

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya : ITA Press.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kejahatan Penghinaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alfian, 1993 *Komunikasi Politik Dan Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Amir Efendi Siregar, 1991, *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Arif Zulkifli, 1996, *PDI Di Mata Golongan Menengah Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Arifin Firmansyah, Et.Al.,Eds. 2004, *Hukum Dan Kuasa Konstitusi*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- A.S. Alam, 2011, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Makassar, 2010. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Atmakusumah, 1992, *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*, Jakarta: Harian Kompas.
- Bacharudin Jusuf Habibie, 2006, *Detik-detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, cetakan kedua, Jakarta: THC Mandiri.

- Bagir Manan, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Basrowi dan Suko Susilo, 2006, *Demokrasi dan HAM*, Kediri: Jengjala Pustaka Utama.
- Bryan A. Garner (Ed), 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, USA: West. A. Thomson Reuters Business.
- C.F.G.Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, cetakan I, Bandung: Alumni.
- C.F.Strong, 1952, *Modern Political Constitution*, revised edition, London: Sidgwick and Jackson.
- Douglas V. Verney, 1959, *The Analysis of Political System*, The Free Press, Chicago.
- Edward C. Smith, 1986, *Pembredelan Pers Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Fatkurohman, Dian Aminudin Dan Sirajuddin. 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M Friedman, 1998, *American Law: an Introduction*. New York: W.W.Norton & Company.
- Hamka Hendra Nder, 2014, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara [General Theory of Law and State]* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cetakan Pertama, Bandung: Nusa Media.

- Jack Donnelly, 1990, *Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*, dalam Jan Berting (ed), *Human rights in Pluralist World*, Middelburg: Rosevelt Study Center.
- Jeremy Waldron, 1999, *The Dignity of Legislation*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Cet. 3, Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan kedua, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie Dan Ahmad Syahrizal. 2006, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Lodewijk Gultom. 2007, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia: Suatu Kajian Dari Aspek Tugas Dan Wewenang nya*. Bandung: CV Utomo.
- Mahfud .M.D., 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi. Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2017, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik; Laporan Tahunan 2014*, Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Mardjono Reksodiputro, 1987, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis; Fungsi; dan Materi Muatan*, Kanisius: Sleman.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- M. Halim, dkk, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta: LBH Pers.
- Moh Mahfud, Et Al, 2010, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencari Keadilan Konstitusional*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- MWE. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh JE. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 1963, *Perundang-Undangan Dan Jurisprudensi*, Jakarta: Tanjung Harapan.
- Refly Harun, Zainal Husein Dan Bisariya Ed., 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi : Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- R. H. Siregar, Komariah Sapardjaja, dan Lukas Luwarso, 2002, *Delik Pers dalam Hukum Pidana* Jakarta: Dewan Pers dan LIN (Lembaga Informasi Nasional).
- R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Robert Van Niel, 2009, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bagian II*, Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, cetakan kedua, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satya Arinanto, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor), 2011, *Memahami Hukum. Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama.

Sudarto, 1983, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2015, *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Syarif Mappiasee, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, cetakan kesebelas, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Todung Mulya Lubis, *Langit Masih Mendung: Laporan Keadaan-Keadaan Hak-Hak Azasi Manusia Di Indonesia 1980*, Jakarta: LBH Jakarta Dan Penerbit Sinar Harapan.

Upriyadi Widodo Eddyono, Fajrime A Gofar, dan Adiani Viviana, 2016, *Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam R KUHP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)).

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal, Makalah dan Artikel**

Atip Latipulhidayat, “Editorial: Merawat Hak Asasi Manusia”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Desember 2016.

Ayunita Nur Rohanawati dan Dian Agung Wicaksono, “Kesetaraan dalam Perjanjian Kerja dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, Desember 2018.

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Desember 2016.

- Dewi Yulianti, “Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia,” *ANUVA* 2, no. 3 (2018).
- Fabian Fadhly, “Islam dan Indonesia Abad XIII-XX M dalam Perspektif Sejarah Hukum,” *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017).
- Fista Prilia Sambuar, “Eksistensi Putusan *Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Lex Administratum* 1 (April-Juni 2013).
- Frank I. Michelman, “The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification,” *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, Januari 2003.
- Hafidz Putra Arifin, “Politik Hukum Cagar Budaya dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia,” *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2019).
- Hamdan Zoelfa, “*Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question* Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Media Hukum* 19 (Juni 2012).
- I Dewa Gede Palguna “*Constitutional Question*: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 1 (Januari 2010).
- I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, “Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, September 2017.
- Isrok. “*Constitutional Question* (Menyoal Konstitusionalitas Pasal Tentang Pengemis Kuhp Pasal 504 Ayat (1) Dan (2),” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 1 (Januari-Maret 2010).
- Janedjri M. Gaffar, “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, Maret 2013.
- Jazim Hamidi Dan Mustafa Lutfi, “*Constitutional Question* : Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya,” *Jurnal Konstitusi* 7 (Februari 2010).
- Jimly Asshiddiqie, “Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden,” *Jurnal Unisia*, No. 51/XXVII/I/2004, Januari – Maret 2004.
- Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 14, Agustus 2000.
- \_\_\_\_\_, “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung; Perspektif Politik dan Hukum Tata Negara,” *Jurnal Unisia*, No. 51/XXVII/I/2004, Januari – Maret 2004.

\_\_\_\_\_, “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum* 4 (Oktober 2009).

Mudzakkir, “Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik (Kajian Putusan No.37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel),” *Dictum; Jurnal kajian Putusan Pengadilan*.

Nunuk Nuswardani, “Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan Law and Legal Reform,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 4, Oktober 2009.

Pan Mohammad Faiz. “A Prospect And Challenges For Adopting Constitutional Complaint And Constitutional Quest Ion In The Indonesian Constitutional Court,” *Constitutional Review* 2 (Mei 2016).

Pan Mohamad Faiz dan Oly Viana Agustine, “Akses Terhadap Keadilan bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi,” dalam Indonesian Judicial Reform Forum, 2018, *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan.

Rahmat Bakri, “Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan,” *Jurnal Academica*, Vol. 2, No. 1, Februari 2010.

Rudy Dan Reisa Malida, “Pemetaan Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6 (September-Desember 2012).

Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, September 2014.

Sunyoto Usman, “Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung,” *Jurnal Unisia*, No. 51/XXVII/I/2004, Januari – Maret 2004.

Widayati, “Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV No. 1.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.



#### D. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tertanggal 4 Desember 2006.

#### E. Sumber Internet

Andi Saputra, “Soal Pasal Penghinaan Presiden, Apakah Presiden Simbol Negara?”, <http://news.detik.com/berita/2986411/soal-pasal-penghinaan-Presiden-apakah-Presiden-simbol-negara>, diakses tanggal 18 Juli 2021.

Au Revoir Hatzaai Artikel! - [hukumonline.com](http://www.hukumonline.com),” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17175/iau-revoiri-hatzaai-artikelen/>, diakses 29 November 2021.

Board of Cooperative Educational System, “The Spirit of Liberty Speech”, [https://www.btbores.org/Downloads/1\\_The%20Spirit%20of%20Liberty%20by%20Learned%20Hand.pdf](https://www.btbores.org/Downloads/1_The%20Spirit%20of%20Liberty%20by%20Learned%20Hand.pdf), diakses 22 Januari 2021.

Christie Stefanie, CNN Indonesia, “Pakar Hukum: Presiden Bukan Simbol Negara, Tak Perlu Pasal,” <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150806185919-32-70561/pakar-hukum-Presiden-bukan-simbol-negara-tak-perlu-pasal/>, diakses tanggal 18 Juli 2021.

Dinna Sabriani, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi,” <http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/CI7068/Kedudukan-Peraturan-Mahkamah-Konstitusi> Diakses 18 Juli 2021.

High Court of Australia, “Edith Cowan University Vice-Chancellor’s Oration”, <https://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/current-justices/frenchcj/frenchcj20nov09.pdf>, diakses 22 Januari 2021.

Michael Bayles, *Law and Politics*, hal. 137. Sebagaimana diunduh dari <http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1014/14.pdf> pada 12 Juli 2021.

memberikan-kritik-kepada-presiden-dan-pemerintah-bukan-tindakan-kriminal, <https://kontras.org/2020/04/08/memberikan-kritik-kepada-presiden-dan-pemerintah-bukan-tindakan-kriminal/>, diakses pada 11 Agustus 2021.

Pan Mohamad Faiz, “Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden, Presiden Tanpa Perisai?”, <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/12/pencabutan-pasal-penghinaan-Presiden.html>, diakses tanggal 18 Juli 2021.



Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP, Lese Majeste ala Indonesia - Tirto.ID, <https://tirto.id/pasal-penghinaan-presiden-di-ruu-kuhp-lese-majeste-alaindonesia-cD6j>, diakses 24 Juni 2021.

Rusdianto S, “Kewenangan *Constitutional Complaint* Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (*Sebuah Studi Perbandingan Dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman Dan Kerajaan Spanyol*)”, <Http://Rusdianto.Dosen.Narotama.Ac.Id/Files/2011/11/07-Rusdianto-Sh-Mh.Pdf> Diakses Pada 18 Juli 2021.

Sasar Kasus Penghinaan Presiden, Polisi Lawan Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Terbuka, Sumber: <Https://Icjr.Or.Id/Sasar-Kasus-Penghinaan-Presiden-Polisi-Lawan-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Secara-Terbuka/> Diakses Pada 17 Juli 2021.

Shidarta, “Lagi Lagi Tentang ‘Haatzaai Artikelen’”, <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/02/26/lagi-lagi-tentang-haatzaai-artikelen/>, Diakses 29 November 2021.